



EDISI SELASA 07 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Soal Ekspor Listrik ke Singapura
Prabowo-Danantara Yakin 'Win-Win', Bahlil Sebut Belum

05

NUSANTARA
Korupsi Batu Bara PLTU Picu Blackout, Polri Estimasi
Negara Rugi Rp5 T

10

LISTSTYLE
Kulit Belang? Ini Langkah Perawatan untuk
Kembalikan Warna Merata Menurut Ahli

KRITIK BERULANG: DITEMUKAN KDMP 'DI ATAS AWAN'

Kritik terhadap pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus berulang. Terbaru, sorotan mencuat setelah video viral memperlihatkan bangunan koperasi di lokasi perbukitan yang terisolasi hingga dijuluki warganet sebagai KDMP 'di atas awan'. Sebelumnya, pembangunan KDMP di kawasan Stone Garden, Kabupaten Bandung Barat, juga menjadi perhatian karena berdiri di area parkir objek wisata geologi yang dinilai jauh dari permukiman warga. Sorotan serupa muncul terhadap pembangunan KDMP senilai Rp1,5 miliar di kawasan tebing Ngarai Sianok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kritik juga mengarah ke pembangunan KDMP di Dusun I, Desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang lokasinya dinilai kurang strategis. Di balik pembangunan fisik tersebut, persoalan operasional juga mulai mencuat. Sejumlah petugas yang telah direkrut mengaku belum menerima petunjuk teknis mengenai tugas mereka. Kepastian mengenai skema kerja maupun besaran gaji juga disebut belum dijelaskan meski proses perekrutan telah berlangsung. Di tengah gelombang kritik itu, pemerintah melakukan penyesuaian target program. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memangkas target operasional KDMP tahun ini menjadi 40.000 unit dari semula 80.000 unit. Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan penyelesaian pembangunan fisik dan sarana pendukung agar unit yang telah dibangun dapat beroperasi secara bertahap. Target operasional penuh gerai KDMP pun bergeser menjadi Oktober 2026, dari rencana sebelumnya yang ditargetkan mulai beroperasi serentak pada Agustus 2026. Kini, pertanyaan publik bukan lagi berapa banyak KDMP yang berhasil dibangun, melainkan berapa banyak yang benar-benar siap beroperasi dan melayani masyarakat. BACA HAL 11...

Target & Capaian



Target gerai nasional 2026.

40.000 unit

Gerai selesai dibangun.

14.000+ unit

Masih dalam pembangunan.

23.000 unit

Target seluruh gerai beroperasi.

1 Oktober 2026

Gerai siap beroperasi di Sulsel

259 unit

KOPERASI

DESA MERAH PUTIH**PER JULI 2026**

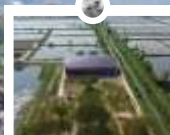
Pembiayaan

Dana Desa 2026
dialihkan untuk KDMP.**50-58 Persen**Sumber :
Berbagai Sumber
DiolahSisa Dana Desa per desa.
Rp300-500 jutaAset gerai
dikelola koperasi desa.
100 Persen

SDM

Kebutuhan manajer lapangan
melalui program SPPI.**40.000 orang**

KDMP VIRAL

KARENA LOKASI DINILAI**TIDAK STRATEGIS****LAMONGAN**
Menghadap Kuburan**WONOGIRI**
Tengah Hutan Jati**PATI**
Berdiri di Tengah Tambak**KENDAL**
Lereng Gunung Prau**BATANG**
Tepi Tebing Curam

Tangkapan foto udara bangunan Koperasi Merah Putih di kawasan wisata Stone Garden, Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.(ist)

Soal Ekspor Listrik ke Singapura

PRABOWO-DANANTARA YAKIN 'WIN-WIN', BAHLIL SEBUT BELUM

Proyek ekspor listrik lintas batas ke Singapura memicu dinamika menarik di internal pemerintahan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menggarap implementasi kerja sama strategis tersebut. Langkah ini menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Leaders' Retreat bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/7/2026).

Presiden Prabowo menegaskan posisi penting badan baru tersebut dalam proyek ini. "Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang perdagangan, energi, ekonomi digital, ekosistem digital, dan keamanan siber," ujar Prabowo.

Penugasan ini sekaligus memperkuat posisi Danantara sebagai motor penggerak utama proyek strategis nasional, termasuk kerja sama energi hijau yang telah dibahas selama bertahun-tahun.

Optimisme besar pun datang dari internal Danantara. CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut proyek ekspor listrik hijau ini sebagai bentuk kerja sama jangka panjang yang melibatkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta. Menurut Rosan, Presiden Prabowo telah memberikan mandat langsung



Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam rangka Pertemuan Tahunan Pemimpin Indonesia-Singapura di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7).

dalam eksekusinya. "Bapak Presiden mengamanatkan untuk Danantara bersama-sama dengan dunia usaha, dengan private sector untuk membangun," kata Rosan.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan proyek ini sebenarnya sudah berlangsung lama, dengan

menyatakan, "Ini kan sudah lama sebenarnya, sudah 4 tahun lebih."

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Danantara akan bekerja sama dengan dua perusahaan energi terkemuka asal Singapura, yaitu Keppel dan Sembcorp. Rosan sangat optimistis bahwa proyek ini akan

INDONESIA-SINGAPURA SEPAKATI 26 KERJA SAMA BARU

Delapan Kerja Sama Utama yang Dipertukarkan

1. Ketahanan rantai pasok (Supply Chain Resilience).
2. Perdagangan karbon (Article 6 Paris Agreement).
3. Pembaruan kerja sama pertahanan.
4. Roadmap perdagangan listrik lintas negara.
5. Investasi energi melalui Danantara, Keppel, Sembcorp, dan Singapore Energy Interconnections.
6. Kerja sama infrastruktur digital Telkom-Economic Development Board Singapore.
7. Pemanfaatan AI untuk perdagangan.
8. Laporan perkembangan kerja sama ekonomi bilateral.

Bidang Kerja Sama Lainnya

1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Riset dan inovasi.
3. Lingkungan hidup.
4. Keselamatan nuklir.
5. Regulasi kesehatan dan obat.
6. Kepemudaan dan olahraga.
7. Teknologi finansial (fintech).
8. Pendidikan.
9. Konektivitas udara.
10. Arsip nasional dan peningkatan kapasitas.
11. Pengembangan petani muda.
12. Kerja sama parlemen.
13. Pengembangan kawasan industri.
14. Energi baru terbarukan.
15. Investasi proyek energi surya Morowali.
16. Pengembangan biogas menjadi biometanol.

Tegaskan Pentingnya Jaga Stabilitas dan Keamanan Selat Malaka

INDONESIA dan Singapura dinilai memiliki keterikatan kepentingan yang sangat kuat di kawasan Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Mengingat kedua negara sama-sama memetik keuntungan ekonomi dari tingginya lalu lintas maritim di kawasan tersebut, komitmen bersama untuk merawat stabilitas dan kedamaian di sana menjadi hal yang sangat krusial.

Pernyataan tersebut diutarakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dalam agenda Leaders' Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/7/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh memastikan kelancaran jalur pelayaran tersebut bagi semua negara. "Kita berkepentingan untuk menjaga Selat

Malaka sebagai perlintasan yang bebas untuk semua pihak," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Kepala Negara memaparkan bahwa tanggung jawab mengantisipasi segala bentuk potensi konflik ataupun gangguan di Selat Malaka bukan hanya bertumpu pada satu negara semata. Kerja sama ini juga melibatkan negara tetangga lainnya, yakni Malaysia dan Thailand, demi menjaga ekosistem selat dari berbagai risiko lingkungan dan kriminalitas maritim. "Kita harus memelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompak atau dari piracy," kata Prabowo menjelaskan.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perlindungan terhadap kawasan ini merupakan agenda vital bagi negara-negara pesisir yang berada di sekitar Selat Malaka. Oleh sebab itu, koordinasi intensif

bersama Malaysia dan Thailand akan terus ditingkatkan demi memastikan kepatuhan terhadap hukum laut internasional. "Ini merupakan kepentingan yang vital bagi kedua negara-negara di sekitar Selat Malaka. Kita akan terus koordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Malaka selalu akan terbuka untuk aman dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses," sambungnya.

Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo menyampaikan keyakinan mendalam bahwa hubungan bilateral yang kokoh antara Indonesia dan Singapura akan memberikan dampak positif yang luas. Menurutnya, kemitraan strategis ini tidak hanya membawa dampak baik bagi masyarakat di kedua negara, melainkan juga menjadi fondasi penting bagi kemakmuran regional. (wid,rla/dya)

menciptakan win-win solution bagi kedua negara, di mana Indonesia mendapatkan investasi dan pasar energi hijau yang luas, sedangkan Singapura memperoleh pasokan listrik bersih untuk mendukung transisi energinya.

Diketahui Danantara resmi menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat proyek ekspor listrik hijau ke Singapura dengan target kapasitas mencapai 3,4 gigawatt (GW) pada 2035. Proyek ini menjadi bagian dari skema perdagangan listrik lintas batas (Cross-Border Electricity Trade/CBET) yang diproyeksikan menjadi tulang punggung kerja sama energi kedua negara.

Melalui kerja sama ini, Danantara menjalin kemitraan dengan dua perusahaan energi Singapura, yakni Keppel Electric dan Sembcorp Utilities, untuk menjajaki pembelian listrik rendah karbon dari Indonesia. Selain itu, juga diteken MoU dengan Singapore Energy Interconnections (SEI) untuk pengembangan aspek teknis dan komersial jaringan interkoneksi listrik lintas negara. (gus,voi,ist/dya)

BANGGAR DPR: ANGGARAN MBG 2027 BERKURANG JADI RP 174 T

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengatakan akan ada pengurangan anggaran untuk program makan bergizi gratis seiring dengan pembatasan jumlah dapur atau satuan pemenuhan pelayanan gizi pada 2027. Dikatakan, dana yang digelontorkan hanya akan sebesar Rp 174 triliun.

Said menghitung, pemangkasan jumlah dapur MBG dari 27 ribu titik menjadi 21 ribu lokasi bisa menghemat puluhan triliun uang negara. "Kalau dari Rp 268 triliun (turun) ke Rp 174 triliun ya tinggi lah (persentase pengurangannya)," kata Said di gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Said, anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tidak akan lebih dari Rp 174 triliun pada tahun depan. Namun, dia juga membuka peluang bisa jadi anggaran MBG diturunkan lagi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN 2027 bersama pemerintah. Pengesahan RUU APBN itu dijadwalkan pada September 2026.

"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ngetok? Kan harus sama pemerintah," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia



Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah

Perjuangan itu,

Said berpendapat, perubahan alokasi anggaran untuk MBG tidak perlu direspons secara reaktif. Termasuk bila ada pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran, kata dia, tidak akan menjadi soal selama tata kelola MBG dijaga sehingga para penerimanya mendapatkan sajian makanan berkualitas.

"MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis

anggaranannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, 'Lah kok turun?' Bukan. Tapi yang penting, menjaga kualitas," ucap Said.

Badan Gizi Nasional belum memastikan anggaran untuk MBG tahun 2027. Meski demikian, sudah ada alokasi pagu indikatif Rp 270 triliun dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk penerima manfaat

ANGGARAN MBG 2026

Total anggaran:

RP 335 TRILIUN
naik 371,8%

Pembagian anggaran:

- Pendidikan
Rp 223,6 triliun
- Dana diendapkan
Rp 67 triliun
- Kesehatan
Rp 24,7 triliun
- Fungsi ekonomi
Rp 19,7 triliun:
- Target penerima
82,9 juta orang
meliputi siswa, mahasiswa, ibu hamil/
menyusui, dan balita.



sebanyak 81,5 juta orang pada tahun depan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, angka itu belum final dan belum ada pembahasan lanjutan dengan dua kementerian tersebut. "Kami masih akan terus membahas. Jadi, kalau kami menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), nah itu kami exercise berapa nilainya," katanya saat ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Arumsari mengatakan akan ada efisiensi kembali agar MBG lebih tepat sasaran. Pada tahun 2026, anggaran BGN telah dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemangkasan anggaran menjadi Rp 268 triliun untuk penghematan. Presiden Prabowo Subianto disebut ingin dana yang digunakan untuk MBG menjadi lebih efisien.

"Jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang," ucap Purbaya, Selasa (19/6/2026).

Adapun realisasi anggaran MBG hingga 30 April tercatat sebesar Rp 75 triliun atau 22,4 persen dari pagu anggaran semula Rp 335 triliun. Dengan belanja itu, MBG telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (tin,tmo,ist/dya)

(Ilustrasi) Peternak tertekan karena harga jual telur tidak sebanding dengan biaya produksi.(dok)



Peternak Bisa Terima Rp31,68 T Jika Pemerintah Perbanyak Menu Ayam-Telur

hari Sabtu, hari libur nasional, dan cuti bersama dengan menjadikan telur sebagai sumber protein utama. HKTI menilai kebijakan tersebut tidak hanya menjaga kesinambungan permintaan produk peternakan, tetapi juga memperluas akses protein hewani bagi penerima manfaat MBG serta mendukung upaya perbaikan gizi dan percepatan penurunan stunting. Berdasarkan simulasi HKTI, selama Juli-Desember 2026 terdapat sekitar 30 hari yang terdiri atas 26 hari Sabtu, tiga hari libur nasional, dan satu hari cuti bersama.

"Dengan asumsi target 82,9 juta penerima manfaat per bulan, terdapat potensi 2,487 miliar penerima-manfaat-hari. Apabila setiap penerima memperoleh dua butir telur pada hari-hari tersebut, kebutuhan mencapai 4,97 miliar butir atau sekitar 298,44 juta kg, setara 298.440 ton telur," kata

Cecep dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).

Selain itu, HKTI mengusulkan kepastian komposisi menu reguler MBG berupa telur sebanyak dua kali dalam sepekan dan ayam tiga kali dalam sepekan. "Kepastian frekuensi menu akan membantu perencanaan produksi, kontrak pasokan, distribusi, investasi, dan stabilisasi harga di tingkat peternak," ujarnya.

Menurut Cecep, kebutuhan telur untuk menu reguler selama Juli-Desember 2026 diperkirakan mencapai 4,318 miliar butir atau setara 258.648 ton. Sementara itu, kebutuhan ayam diproyeksikan mencapai sekitar 646.620 ton karkas. Dengan demikian, total potensi penyerapan kedua komoditas tersebut diperkirakan mencapai 905.268 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp31,68 triliun. (bis,ist/dya)

HIMPUNAN Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan pemerintah memperbesar porsi ayam dan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sumber protein hewani.

Langkah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penyerapan hasil peternakan sekaligus memperbaiki gizi masyarakat. Wakil Ketua Umum DPN HKTI Bidang Peternakan Cecep M u h a m m a d W a h y u d i n memperkirakan potensi penyerapan ayam dan telur melalui program MBG mencapai 905.268 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp31,68 triliun sepanjang Juli-Desember 2026.

Salah satu usulan HKTI ialah mengembalikan layanan MBG pada

IBU HAMIL TEWAS TERTEMBAK DI PAPUA

KOMNAS HAM DESAK INVESTIGASI INDEPENDEN

Kasus tewasnya seorang ibu hamil berinisial MD di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, terus menjadi sorotan. Di tengah beredarnya berbagai versi mengenai insiden tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar dilakukan investigasi yang independen, transparan, dan imparial untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, penyelidikan tidak boleh hanya bertumpu pada klaim sepihak dari pihak-pihak yang terlibat dalam kontak senjata. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan forensik di tempat kejadian perkara serta mewawancarai para saksi demi memastikan fakta yang sebenarnya.

"Atas peristiwa tersebut, Komnas HAM menyatakan sikap dan merekomendasikan sebagai berikut, mendesak investigasi yang independen, transparan, dan imparial, tidak semata mengandalkan klaim sepihak dari salah satu pihak yang terlibat kontak senjata," ujar Anis dalam keterangan resminya, Srnin(6/7)2026).

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM, insiden terjadi pada Kamis (2/7) malam ketika berlangsung kontak tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Distrik Sugapa. Saat berada di dalam rumahnya, MD terkena peluru hingga meninggal dunia bersama bayi yang masih dikandungnya.

Komnas HAM mengutuk peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi konflik bersenjata.

"Kematian warga sipil akibat operasi keamanan atau kontak senjata merupakan pelanggaran atas hak ini yang wajib diusut," kata Anis.

Ia menilai kematian MD menjadi pengingat bahwa di balik angka korban konflik di Papua terdapat keluarga dan komunitas yang harus menanggung kehilangan. Karena itu, investigasi yang akuntabel harus dilakukan agar tragedi serupa tidak



Keluarga menangis di depan jenazah korban penembakan, Okto Tigau, Intan Jaya, Papua, 1 Juli lalu. Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, yang menyaksikan penemuan jenazah Okto, terlihat emosional dan membuka baju dinas. (dok)

kembali terjadi.

"Tanpa proses hukum yang transparan dan berujung pada pertanggungjawaban yang jelas, situasi ini berisiko melanggengkan pola impunitas yang pada akhirnya

merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara maupun proses penyelesaian konflik itu sendiri," ujarnya.

Selain mendesak penyelidikan, Komnas HAM meminta negara

memberikan pemulihan bagi keluarga korban melalui dukungan psikososial serta pendampingan untuk memperoleh hak atas kompensasi sesuai ketentuan hukum. Komnas HAM juga meminta akses tanpa hambatan untuk melakukan penyelidikan langsung di lokasi kejadian, bertemu keluarga korban, serta memperoleh dokumen yang dibutuhkan.

Tidak hanya itu, Komnas HAM mendesak penghentian segera kontak senjata di kawasan permukiman oleh seluruh pihak yang bertikai. Lembaga tersebut juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan di Papua dan meminta pemerintah membuka ruang dialog yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sipil sebagai upaya penyelesaian konflik dalam jangka panjang. (wid,ist/kum)

DPR: Negara Belum Maksimal Lindungi Warga Sipil

KASUS tewasnya seorang ibu hamil beserta bayi yang dikandungnya akibat terkena peluru saat kontak senjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, memicu sorotan terhadap perlindungan negara bagi warga sipil di wilayah konflik. Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, menilai peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

"Kami sangat prihatin atas kematian seorang ibu hamil beserta

bayi yang dikandungnya akibat konflik bersenjata. Tragedi ini menjadi cermin bahwa negara belum mampu memberikan perlindungan maksimal kepada warga sipil, khususnya perempuan dan anak, yang berada di wilayah konflik," kata Mafirion dalam keterangan tertulis, Senin(6/7).

Menurut Mafirion, kematian Melkiana Dwitau bukan sekadar insiden di tengah konflik, tetapi menjadi alarm bahwa mekanisme perlindungan terhadap warga sipil di daerah rawan konflik belum berjalan secara optimal. Karena itu, ia meminta pemerintah mengusut tuntas kasus tersebut melalui investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel.

"Pemerintah harus membuka secara jelas kronologi kejadian, mengungkap siapa pelakunya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum," ujarnya.

Ia menegaskan pengusutan menyeluruh diperlukan bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi

korban dan keluarganya, tetapi juga mencegah tragedi serupa kembali terjadi. Menurutnya, tanpa proses hukum yang jelas, impunitas akan terus berulang dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin terkikis.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh rasa aman. Negara tidak boleh membiarkan hilangnya nyawa warga sipil berlalu tanpa kepastian hukum. Pengusutan yang tuntas merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan," kata politikus PKB tersebut.

Mafirion juga menyoroti dampak konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, warga sipil tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga menghadapi ketakutan berkepanjangan, terganggunya akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga hilangnya mata pencaharian. (ist,bbc/dya)

Sekelompok warga Intan Jaya mengungsi akibat konflik bersenjata yang terus meningkat dan menimbulkan korban jiwa. (dok)



KORUPSI BATU BARA PLTU PICU BLACKOUT, POLRI ESTIMASI NEGARA Rugi Rp5 T

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri meningkatkan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan yang berlangsung selama periode 2018–2026 itu diduga tidak hanya merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp5 triliun, tetapi juga berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman listrik (blackout) di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Totok Suharyanto, mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menyelesaikan penyelidikan secara komprehensif, meliputi pengumpulan dokumen, permintaan keterangan saksi, serta analisis awal terhadap alat bukti.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026," ujar Totok dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Peningkatan status tersebut ditandai dengan diterbitkannya Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/63/VII/RES.3.1./2026/Kortastipidkor, keduanya tertanggal 4 Juli 2026.

Dalam penyelidikan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara ke PLTU yang diduga melibatkan sedikitnya dua perusahaan, yakni PT OBP dan PT BRA. Menurut Totok, dugaan praktik tersebut telah berlangsung sejak 2018 hingga 2026.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat PT OBP dan PT BRA," kata Totok.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengungkapkan penyidik menemukan sejumlah modus yang diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

"Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU," ujar Robertus.

Selain itu, penyidik juga menduga terjadi penyimpangan dalam mekanisme pembayaran kontrak sehingga nilai yang dibayarkan negara tidak sesuai dengan kondisi riil pasokan batu bara.

"Serta dugaan penyimpangan



yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil," lanjutnya.

Menurut Robertus, praktik manipulasi tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah PLTU. Kondisi itu diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya blackout di berbagai daerah.

"Perbuatan atau modus-modus tersebut kami duga juga berkontribusi

terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek," jelas Robertus.

Polri mengindikasikan kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp5 triliun. Nilai tersebut mencakup kerugian keuangan negara sekaligus dampak terhadap perekonomian akibat pemadaman listrik yang terjadi.

"Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun," kata Robertus.

Meski demikian, ia menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara karena penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif.

"Namun terkait nilai pasti, saat ini sedang kami koordinasikan dengan BPK RI untuk melakukan audit investigasi secara resmi." (tin,rls,dtc/dya)

DATA KRONOLOGI PEMADAMAN LISTRIK

- **22 Mei 2026**
Pulau Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan wilayah lain)
- **23 Mei 2026**
Sebagian wilayah Sumatera
- **9–10 Juni 2026**
Bekasi, Bogor, Depok, Wonogiri, Sukoharjo, dan Karanganyar
- **14 Juni 2026**
Jabodetabek, Surabaya dan sekitarnya



"Awalnya kita sudah mengeluarkan (pemanggilan) 34 (saksi), tapi yang baru bisa diklarifikasi 16," ujar Totok.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga telah menganalisis berbagai dokumen yang menjadi dasar peningkatan status perkara.

"Beberapa dokumen juga sudah kita analisis sehingga kita menemukan peristiwa pidana korupsi tadi sehingga kita naikan ke proses penyidikan," katanya. (tin,ist/dya)

Dua Perusahaan Diduga Terlibat, Kementerian ESDM Segera Dipanggil

KORPS Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penyidik menduga praktik korupsi yang berlangsung sepanjang 2018–2026 itu melibatkan dua perusahaan dan menyebabkan kerugian negara serta perekonomian negara sekitar Rp5 triliun akibat terganggunya pasokan batu bara hingga memicu pemadaman listrik (blackout) di berbagai daerah.

Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan perkara tersebut resmi naik ke tahap penyidikan pada 4 Juli 2026 setelah penyidik menyelesaikan penyelidikan secara komprehensif.

"Berdasarkan hasil penyelidikan

yang dilakukan secara komprehensif, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026," kata Totok dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (6/7/2026).

Dalam penyidikan awal, penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang melibatkan dua perusahaan penyedia batu bara, yakni PT OBB dan PT BRA.

"Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat PT OBB dan PT BRA," ujar Totok.

Hingga kini penyidik telah memeriksa 16 saksi. Sebelumnya, penyidik telah melayangkan pemanggilan kepada 34 saksi, namun baru 16 orang yang memenuhi panggilan.

Kota Malang Wacanakan Merger Sekolah Buntut 10 SDN Kekurangan Murid

MALANG- Lebih dari 10 sekolah dasar (SD) negeri di Kota Malang masih mengalami kekurangan murid dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Bahkan, terdapat sekolah yang hanya memperoleh sekitar 5 hingga 6 siswa dari pagu normal 28 siswa per kelas.

Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang kembali mempertimbangkan opsi penggabungan atau merger sekolah.

"Ada beberapa yang memang kekurangan murid. Lebih dari 10. Tetapi ternyata secara nasional juga banyak SD negeri yang kekurangan murid, tidak hanya di Kota Malang saja. Mungkin karena banyaknya SD di kota-kota," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Disdikbud Kota Malang, Muflih Adhim, dikonfirmasi pada Senin (6/7/2026).

Namun Adhim memastikan tidak ada sekolah yang hanya mendapatkan satu atau dua siswa. "Jumlahnya tidak yang hanya satu atau dua siswa saja, lebih dari lima. Ada yang terisi hanya

lima sampai enam siswa, karena kalau secara normal pagunya 28 per kelas," jelasnya.

Adhim menambahkan, batas maksimal 28 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) mengacu pada ketentuan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Apabila jumlah siswa melebihi batas tersebut, maka kelebihan jumlah siswa tidak diakui dalam sistem Dapodik.

Disinggung mengenai kemungkinan penggabungan sekolah akibat minimnya jumlah siswa, Adhim mengatakan merger masih menjadi salah satu opsi. Namun, Disdikbud Kota Malang perlu melakukan analisis terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Opsi tersebut sebenarnya juga telah muncul dalam beberapa tahun terakhir seiring adanya sejumlah SD negeri yang terus mengalami kekurangan murid. "Masih jadi opsi, kami perlu analisa juga," tegasnya.

Menurut Adhim, sekolah-sekolah yang kekurangan murid tersebar relatif merata di Kota Malang. Menariknya, kondisi tersebut justru

banyak ditemukan di kawasan tengah kota.

Ia menilai, perubahan fungsi kawasan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah calon siswa di sekitar sekolah. Kawasan pusat kota dinilai tidak lagi didominasi sebagai wilayah hunian, sementara permukiman penduduk semakin berkembang ke wilayah pinggiran.

Lebih lanjut, mengatasi persoalan masih adanya kekurangan murid tersebut, Disdikbud membuka peluang pengisian sisa pagu setelah proses SPMB daring selesai. Berdasarkan ketentuan, sekolah yang masih memiliki kekurangan kuota dapat menerima pendaftaran secara luring atau offline.

Peluang tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh calon siswa dari luar Kota Malang. Disebutkannya, tingginya



Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Muflih Adhim. (Santi/Lentera)

minat masyarakat dari wilayah sekitar dapat menjadi salah satu potensi untuk mengisi kekurangan murid di sekolah-sekolah negeri.

"Kalau di Kota Malang sudah tidak ada, dari kabupaten nanti bisa masuk. Kami masih mengevaluasi, karena banyak peminat dari luar Kota Malang. Ini nanti bisa untuk mengisi kekurangan," katanya. (Santi/Dya)

BPBD Sebut 80% Kecamatan di Kabupaten Malang Dibayangi Kebakaran Hutan



Penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Malang. (foto: BPBD Kab. Malang)

MALANG - Nyaris 80 persen kecamatan di Kabupaten Malang dibayangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memetakan potensi karhutla di 26 dari total 33 kecamatan yang ada.

"Lima kecamatan dengan luas ancaman terbesar yakni Sumbermanjing Wetan, Pujon, Poncokusumo, Tirtoyudo, dan

Ampelgading," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Senin (6/7/2026).

Kemudian, lanjutnya, Sumbermanjing Wetan menjadi wilayah dengan cakupan ancaman terluas, mencapai 143,73 kilometer persegi dengan 54.208 penduduk berpotensi terpapar.

Disusul Pujon dengan luas ancaman 109,18 kilometer persegi dan 56.658 penduduk terpapar. Kemudian Poncokusumo seluas 100,70 kilometer persegi dengan jumlah penduduk terpapar mencapai 90.716 jiwa.

Sementara itu, luas ancaman karhutla di Tirtoyudo mencapai 85,32 kilometer persegi dengan 36.550 penduduk terpapar. Adapun Ampelgading memiliki luas ancaman 77,78 kilometer persegi dengan 51.329 penduduk terpapar.

Sadono mengatakan, besarnya cakupan hutan dan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam mengantisipasi karhutla. Total luas hutan dan lahan di Kabupaten Malang mencapai 3.531 kilometer persegi.

"Pemantauan (ke seluruh titik) dan koordinasi menjadi salah satu tantangan kami," kata Sadono.

Tantangan penanganan karhutla menurutnya juga semakin kompleks karena sejumlah titik kebakaran berpotensi berada di kawasan hutan dan lereng yang sulit dijangkau petugas pemadaman darat.

Kondisi medan ekstrem juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja selama operasi pemadaman. Di sisi lain, BPBD Kabupaten Malang masih menghadapi keterbatasan personel yang memiliki kemampuan khusus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Kami juga memiliki keterbatasan jumlah personel yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam operasi pemadaman darat," tutur Sadono.

Ancaman tersebut bukan tanpa alasan. Pada musim kemarau 2024, disebutkannya, BPBD Kabupaten Malang mencatat sedikitnya 18 titik kejadian karhutla.

Kebakaran saat itu terjadi di kawasan hutan Perhutani maupun lahan milik masyarakat yang tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Singosari, Kromengan, Bantur, Kalipare, dan Wonosari.

"Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau juga dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS). Salah satu upaya yang dilakukan yakni membentuk dan membina kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa," katanya.

Sadono menilai keberadaan MPA cukup efektif untuk mempercepat deteksi dini kemunculan titik api. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tersebut juga dibekali kemampuan penanganan awal kebakaran agar api dapat dikendalikan sebelum meluas. (Santi/Dya)

Gaza Hari Ini: Update Korban & Dampak Kemanusiaan

Warga Tewas
73.058+

Warga Luka-luka
173.488+

Perempuan & Anak-anak
70% Korban



DUA DEKADE BERKUASA, HAMAS BUBARKAN BADAN PEMERINTAHAN DI JALUR GAZA

Kelompok Hamas secara resmi mengumumkan pembubaran badan yang selama hampir dua dekade terakhir mengelola pemerintahan sipil di Jalur Gaza, Senin (6/7/2026). Langkah politik yang dinilai signifikan ini diambil guna membuka jalan bagi sebuah komite teknokrat Palestina, yaitu National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), untuk mengambil alih seluruh fungsi administrasi sipil di wilayah yang luluh lantak akibat perang tersebut.

Keputusan ini menandai pergeseran peta politik yang besar bagi Hamas. Kelompok tersebut telah memegang kendali penuh atas Jalur Gaza sejak memenangi pemilu legislatif pada

tahun 2006, yang kemudian diikuti dengan perebutan kekuasaan dari faksi saingannya, Fatah, melalui konflik berdarah pada tahun 2007 silam.

Sejak kesepakatan gencatan

senjata dengan Israel mulai diberlakukan pada Oktober 2025 lalu, Hamas sebenarnya telah berulang kali menyatakan kesiapan mereka untuk mundur dari urusan pemerintahan sehari-hari. Namun,

implementasi di lapangan terus terbentur oleh berbagai persoalan pelik, terutama terkait isu demiliterisasi dan perlucutan senjata.

Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail al-Thawabta, mengonfirmasi kepada AFP bahwa pengunduran diri secara resmi telah diajukan oleh Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed al-Farra. Pengunduran diri ini sekaligus menandai pembubaran resmi komite beranggotakan 15 orang tersebut demi mempermudah transisi administratif.

"Gerakan ini telah memutuskan untuk membubarkan komite pemerintahan Gaza dan menunjuk sosok yang dapat diterima secara nasional untuk mengawasi kinerja komite tersebut hingga Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) secara resmi mengambil alih tanggung jawab," ujar salah seorang pejabat Hamas yang enggan disebutkan namanya kepada AFP.

Pembubaran badan administratif ini nantinya akan menyerahkan tanggung jawab pemerintahan sipil kepada NCAG. Komite teknokrat ini dipimpin oleh seorang teknokrat Palestina bernama Ali Shaath. NCAG sendiri dibentuk di bawah naungan Board of Peace, sebuah badan yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat bertindak sebagai mediator gencatan senjata pada Oktober 2025 lalu. Hingga saat ini, komite tersebut masih menjalankan operasinya secara jarak jauh dari Kairo, Mesir.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa langkah mundur dari tata kelola pemerintahan sipil ini merupakan strategi terukur untuk mematahkan argumen politik luar negeri Israel. (ist,rtr/dya)

Israel Bersikeras Demiliterisasi Jadi Syarat Utama



warga Palestina yang mengungsi dari kota Beit Hanoun di Gaza pada tanggal 18 Maret 2025. (Foto Arsip:AFP)

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa proses rekonstruksi atau pembangunan kembali di Jalur Gaza tidak akan pernah dimulai tanpa adanya pembongkaran total terhadap seluruh infrastruktur militer di daerah kantong Palestina tersebut. Selain itu, Netanyahu juga menegaskan kembali tuntutanannya mengenai perlucutan senjata secara

menyeluruh dari kelompok-kelompok militan yang berada di wilayah itu sebelum bantuan pemulihan pascaperang dapat dialokasikan.

S i k a p k a k u pemerintah Israel ini disampaikan di tengah berjalannya fase gencatan senjata yang dirancang oleh para mediator internasional sejak 10 Oktober 2025 lalu, yang kini dinilai banyak pihak sedang mengalami stagnasi atau jalan buntu yang serius.

Dalam pernyataan terbarunya, Netanyahu menjelaskan posisi politiknya mengenai masa depan penduduk sipil di wilayah daerah kantong tersebut. Netanyahu mengatakan bahwa penduduk Gaza bebas memilih untuk tetap tinggal atau pergi, asalkan mereka tidak menimbulkan ancaman. Lebih lanjut, pemimpin Israel itu mengklaim

bahwa keberhasilan militernya dalam menekan kekuatan lawan telah membuahkan hasil nyata di lapangan.

"Ancaman dari Gaza telah dilenyapkan," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pernyataan terbarunya.

Hal itu, menurut PM Israel tersebut, dicapai melalui zona penyangga (buffer zone) yang dibentuk oleh militer Israel di dalam wilayah Jalur Gaza melalui operasi militer dan pengetatan kendali teritorial yang dilakukan oleh pasukannya secara intensif di lapangan.

Netanyahu juga menambahkan bahwa hilangnya ancaman keamanan dari arah Gaza secara langsung telah meningkatkan kembali permintaan akan hunian di permukiman-permukiman Israel yang terletak dekat dengan perbatasan Gaza karena situasi keamanan yang dinilainya telah membaik secara signifikan. (rtr,ist/dya)

Sabun Batang Vs Sabun Cair

Memilih Pelindung Terbaik untuk Skin Barrier

Aktivitas membersihkan tubuh merupakan bagian integral dari upaya menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Dalam praktiknya, masyarakat umumnya menggunakan dua jenis produk pembersih, yaitu sabun batang dan sabun cair. Meskipun memiliki fungsi yang sama, kedua produk tersebut dikembangkan dengan formulasi, mekanisme kerja, dan karakteristik yang berbeda.

Perbedaan tersebut tidak hanya memengaruhi pengalaman penggunaan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pembersihan, keamanan bagi kulit, efisiensi konsumsi, serta dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik masing-masing jenis sabun menjadi penting agar konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulitnya.

Kita sering kali hanya terpicat oleh keharuman yang semerbak atau janji-janji iklan, padahal esensi utama sabun adalah membersihkan sekaligus menjaga lapisan pelindung alami kulit (skin barrier) tetap utuh. Pemilihan yang keliru bukan sekadar membuat proses pembersihan menjadi tidak efektif, melainkan dapat mengikis kelembapan

alami yang menjadi akar dari berbagai masalah kulit.

Perbedaan paling mendasar dari kedua jenis pembersih tubuh ini sejatinya bermula dari laboratorium tempat mereka diracik. Sabun batang lahir dari sebuah proses kimia klasik bernama saponifikasi atau kaustik, di mana minyak dan lilin dipadukan dengan alkali. Setelah perpaduan tersebut terjadi, campuran sabun harus didiamkan selama sekitar enam hingga delapan minggu dalam proses yang disebut aging.

Periode yang cukup lama ini sangat krusial agar seluruh reaksi kimia selesai dengan sempurna dan bahan-bahan tertentu menguap, hingga akhirnya menghasilkan batangan padat yang siap digunakan.

Di sisi lain, sabun cair menempuh jalur produksi yang sama sekali berbeda. Komponen utamanya yang kaya akan air melahirkan tekstur yang jauh lebih lembut dan tidak terlalu pekat. Karakteristik ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para produsen karena mereka dapat dengan mudah memperkaya produk dengan berbagai bahan aktif penunjang kesehatan kulit, mulai dari minyak alami, ekstrak tumbuhan, zat pelembap seperti emolien dan ceramide, hingga agen eksfoliasi yang dirancang khusus untuk

mengatasi problem kulit tertentu.

Jika menilai keunggulan masing-masing, sabun batang memegang kartu as dalam hal stabilitas formula dan kelestarian lingkungan. Karena formulanya tidak mengandung air, risiko pertumbuhan bakteri selama sabun disimpan dengan benar menjadi jauh lebih kecil. Absennya air ini juga membuat sabun batang umumnya tidak membutuhkan tambahan bahan pengawet kimia. Dari sudut pandang ekologis, sabun batang adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Sebagian besar produk hanya dikemas menggunakan kertas atau kotak karton tipis sehingga menghasilkan lebih sedikit sampah plastik dibandingkan sabun cair.

Kendati demikian, sabun batang bukannya tanpa cela. Struktur kimianya membuat sabun jenis ini memiliki tingkat keasaman atau pH yang relatif tinggi, berkisar antara angka 9 hingga 10, yang merupakan bagian mutlak dari proses pembuatannya sehingga tidak mudah diubah.

Bagi sebagian orang, terutama pemilik kulit sensitif, pH yang tinggi ini dapat mengikis kelembapan dan membuat kulit terasa lebih kering setelah digunakan. Selain itu, ada pula keluhan klasik mengenai residu sabun batang yang kerap meninggalkan lapisan lengket, baik pada permukaan kulit maupun pada dinding kamar mandi.

Kelemahan sabun batang itulah yang kemudian dijawab oleh kehadiran sabun cair. Dengan formulasi yang lebih fleksibel, tingkat pH sabun cair dapat disesuaikan selama proses pembuatan agar lebih mendekati pH alami kulit. Sabun cair melimpah akan kandungan bahan yang berfungsi melembapkan dan menenangkan kulit, sehingga mampu membersihkan tanpa menghilangkan minyak alaminya.

Dari segi higienitas, kemasan botol juga memastikan isi produk tetap steril dan tidak mudah terpapar kontaminasi dari luar. Namun, kenyamanan ini harus dibayar mahal oleh lingkungan, mengingat botol plastik

pembungkusannya menyumbang lebih banyak limbah, di samping keharusan penggunaan bahan pengawet demi mencegah pertumbuhan jamur dalam medium yang kaya air.

Pada akhirnya, pilihan sabun terbaik sepenuhnya bergantung pada kondisi unik kulit masing-masing. Jika kulit Anda cenderung sensitif dan mudah mengalami iritasi, sabun batang bisa menjadi pilihan bijak karena umumnya memiliki formulasi yang lebih sederhana sehingga risiko memicu alergi lebih kecil.

Sebaliknya, jika kulit Anda cenderung kering, terasa tertarik, kasar, bersisik, atau gatal setelah mandi, sabun cair biasanya jauh lebih cocok karena mengandung lebih banyak bahan yang membantu menjaga kelembapan. Penderita masalah kulit kronis seperti eksim maupun jerawat juga lebih disarankan menggunakan sabun cair karena berbagai bahan aktif therapeutics terbukti lebih mudah diformulasikan ke dalamnya agar bekerja selembut mungkin sesuai kebutuhan kulit.

Apa pun jenis sabun yang bertengger di kamar mandi Anda, kebijaksanaan dalam memperhatikan kandungan label adalah kunci utamanya. Pilihlah produk yang mengandung bahan pelembap seperti ceramide, glycerin, serta minyak alami seperti minyak alpukat, argan, dan kelapa untuk melindungi skin barrier. (wid,ist/dya)

Panduan Memilih Sesuai Kondisi Kulit

Gunakan Sabun Cair Jika:

Kulit Anda cenderung kering, kasar, bersisik, gatal, sensitif, atau mengidap masalah kronis seperti eksim dan jerawat.

Gunakan Sabun Batang Jika:

Kulit Anda termasuk kategori normal, tidak mudah alergi, atau Anda mengutamakan gaya hidup minimalis yang minim sampah plastik.

Rambu-Rambu Kandungan Sabun (Ingredients)

Bahan Rekomendasi:

Ceramide, glycerin, minyak alami (argan, alpukat, kelapa) untuk menjaga hidrasi, serta lactic acid atau salicylic acid.

Bahan yang Harus Dihindari (Khusus Kulit Sensitif):

Pewangi tambahan (fragrance), triclosan, serta zat antimikroba/antibakteri yang terlalu keras karena dapat merusak ekosistem bakteri baik di kulit dan memicu iritasi.

Sejarah Baru di Incheon: Ketika Robot Humanoid Kuasai Lapangan Hijau



langsung ke dalam fisik robot. Menggunakan sensor penglihatan komputer (computer vision), robot mampu mendeteksi bola, memetakan posisi kawan atau lawan, hingga merancang taktik operan secara real-time.

Aksi jatuh bangun akibat benturan fisik antarrobot sempat memicu riuh penonton di tribun Songdo Convensia.

Kendati demikian, sistem keseimbangan dinamis terbaru memungkinkannya bangkit secara mandiri hanya dalam hitungan detik

keras otonom terbukti mampu meminimalkan delay (jeda) pengambilan keputusan saat robot harus mengalkulasi lintasan bola di atas rumput.

Tantangan Menuju Tahun 2050

Sejak pertama kali dideklarasikan pada tahun 1997, RoboCup memegang komitmen jangka panjang yang ambisius.

Misi utama mereka adalah melatih dan mengembangkan tim robot humanoid otonom yang mampu memenangkan pertandingan sepak bola melawan manusia juara dunia FIFA pada tahun 2050.

Kendati sukses menggelar format penuh 11-vs-11, catatan akademis dari tim peneliti Technical Committee RoboCup menggarisbawahi bahwa jalan menuju tahun 2050 masih menghadapi tantangan multidimensi.

Masalah utama yang mendesak untuk diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan bukan lagi sekadar pada kecerdasan buatan (software), melainkan batasan fungsional perangkat keras (hardware).

Untuk bisa bertanding di lapangan eksternal berskala penuh melawan manusia, industri robotika masih harus memecahkan sejumlah tantangan teknis yang kompleks. Masalah utama terletak pada efisiensi manajemen daya baterai agar robot mampu mempertahankan performa tinggi sepanjang pertandingan tanpa sering mengisi ulang daya. Selain itu, ketahanan material sendi mekanis juga perlu ditingkatkan secara drastis guna menahan benturan keras berkecepatan tinggi saat terjadi kontak fisik di lapangan.(ist/dya)



Kompetisi robotika dan kecerdasan buatan terbesar di dunia, RoboCup 2026, resmi berakhir di Songdo Convensia, Incheon, Korea Selatan, Minggu (5/7/2026). Perhelatan tahun ini mencatatkan sejarah baru dalam dunia teknologi global melalui pembuktian perdana format pertandingan sepak bola penuh sebelas lawan sebelas (11-vs-11) untuk kategori robot humanoid otonom di atas lapangan nyata.

Ajang bergengsi yang berlangsung sejak 30 Juni lalu ini melampaui rekor organisasi dengan menghadirkan lebih dari 3.000 peserta dari 45 negara. Fokus utama perhatian dunia tertuju pada ketangkasan robot-robot berwujud menyerupai manusia yang bertanding tanpa intervensi manual

sedikit pun dari para penciptanya. Di partai puncak divisi ukuran standar, dominasi teknologi Asia Timur kembali terbukti. Tim Hephaestus dari Universitas Tsinghua, Cina, sukses menyabet gelar juara pertama setelah laga sengit melawan tim senegarannya.

Lompatan Embodied AI

Berbeda dengan edisi terdahulu yang kerap diwarnai gerakan kaku, robot-robot humanoid pada RoboCup 2026 menunjukkan integrasi tingkat tinggi dari Embodied AI, teknologi yang menanamkan kecerdasan buatan

untuk mengejar bola kembali.

Dalam laporan evaluasi teknis resmi RoboCup Federation (RCF), komite liga menyatakan bahwa transisi ke format pertandingan yang lebih besar tahun ini berhasil menguji batas kemampuan komunikasi nirkabel antarlokalisasi mesin (multi-robot localization) dan koordinasi dinamis di lingkungan yang tidak terprediksi.

Algoritma pembelajaran mesin (machine learning) yang diimplementasikan pada perangkat



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Kulit Belang? Ini Langkah Perawatan untuk Kembali Warna Merata Menurut Ahli

Hampir setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia beraktivitas di bawah paparan sinar matahari. Berangkat bekerja menggunakan sepeda motor, menunggu transportasi umum, mengajar, bertugas di lapangan, hingga sekadar berbelanja ke pasar, semuanya membuat kulit terpapar sinar ultraviolet (UV) dalam waktu yang tidak sebentar.

Akibatnya, banyak orang mengeluhkan warna kulit yang berubah menjadi lebih gelap pada bagian tertentu sehingga tampak belang atau tidak merata.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan estetika. Para ahli dermatologi menjelaskan bahwa paparan sinar matahari yang berlebihan dapat memicu berbagai perubahan biologis pada kulit, mulai dari peningkatan produksi melanin sebagai mekanisme perlindungan alami, kerusakan kolagen, munculnya bintik hitam (hyperpigmentation), kulit kusam, hingga mempercepat tanda-tanda penuaan dini.

Menurut American Academy of Dermatology (AAD), sinar ultraviolet terdiri atas UVA dan UVB yang sama-sama dapat merusak kulit. UVA mampu menembus lapisan kulit lebih dalam sehingga berkaitan dengan penuaan dini, sedangkan UVB menjadi penyebab utama kulit terbakar akibat matahari (sunburn).

Keduanya sama-sama meningkatkan risiko pigmentasi tidak merata apabila kulit terus-menerus terpapar tanpa perlindungan yang memadai.

Di negara beriklim tropis seperti Indonesia, risiko tersebut semakin besar karena intensitas sinar matahari relatif tinggi sepanjang tahun. Karena itu, menjaga kesehatan kulit bukan hanya dilakukan ketika muncul masalah, tetapi harus menjadi kebiasaan sehari-hari.

Kulit memiliki sistem pertahanan alami berupa melanin, yaitu pigmen yang diproduksi oleh sel melanosit. Saat kulit menerima paparan sinar UV, tubuh akan meningkatkan produksi melanin untuk melindungi sel-sel kulit dari kerusakan DNA. Produksi melanin yang meningkat inilah yang menyebabkan warna kulit menjadi lebih gelap.

Namun, paparan sinar matahari tidak selalu mengenai seluruh permukaan tubuh secara merata. Wajah, tangan, lengan, leher, atau kaki sering kali menerima paparan lebih banyak dibandingkan bagian tubuh

lain yang tertutup pakaian. Akibatnya, muncul perbedaan warna kulit yang dikenal sebagai kulit belang atau uneven skin tone.

Selain sinar UV, radikal bebas yang terbentuk akibat paparan matahari juga mempercepat kerusakan kolagen dan elastin. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu munculnya garis halus, keriput, kulit kusam, hingga flek hitam.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan mengingatkan bahwa paparan radiasi ultraviolet yang berlebihan merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai gangguan kulit sehingga upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin.

Banyak orang tergoda menggunakan produk pemutih instan ketika kulit mulai belang. Padahal, dokter kulit menekankan bahwa prioritas utama bukanlah memutihkan kulit, melainkan memperbaiki skin barrier atau lapisan pelindung kulit yang telah mengalami stres akibat sinar matahari.

Skin barrier yang sehat akan membantu kulit mempercepat proses regenerasi, mempertahankan kelembapan, sekaligus mengurangi risiko iritasi maupun hiperpigmentasi yang semakin parah. Oleh karena itu, perawatan yang tepat harus dilakukan secara bertahap dan konsisten.

Eksfoliasi Teratur

Salah satu langkah penting mengatasi kulit belang adalah melakukan eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati secara berkala.

Menurut Ohio State University Wexner Medical Center, proses eksfoliasi membantu mempercepat pergantian sel kulit sehingga lapisan kulit baru yang lebih sehat dapat muncul ke permukaan. Dengan demikian, warna kulit

akan tampak lebih merata dan tekstur kulit menjadi lebih halus.

Namun, eksfoliasi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Para ahli menyarankan frekuensi sekitar satu hingga dua kali dalam seminggu, tergantung jenis kulit. Terlalu sering melakukan eksfoliasi justru dapat merusak lapisan pelindung kulit dan meningkatkan sensitivitas terhadap sinar matahari.

Pemilik kulit sensitif sebaiknya memilih eksfoliator yang lembut, sedangkan kulit berminyak dapat menggunakan kandungan seperti AHA atau BHA sesuai anjuran tenaga kesehatan atau petunjuk produk.

Bersihkan dan Lembapkan Setiap Hari

Setelah beraktivitas di luar ruangan, kulit dipenuhi debu, polusi, minyak, serta sisa tabir surya. Membersihkan kulit menjadi langkah dasar yang tidak boleh dilewatkan.

Membersihkan wajah maupun tubuh dua kali sehari membantu menghilangkan kotoran yang dapat menyumbat pori-pori sekaligus mempersiapkan kulit menerima produk perawatan berikutnya.

Namun, membersihkan saja tidak cukup. Kulit yang kehilangan kelembapan

akibat panas matahari memerlukan pelembap agar fungsi skin barrier kembali optimal.

Colorescience menjelaskan bahwa kelembapan kulit yang terjaga membantu mendukung regenerasi sel serta mempertahankan produksi kolagen yang penting untuk memperbaiki kerusakan akibat paparan sinar UV.

Pilih pelembap yang sesuai dengan jenis kulit. Kandungan seperti ceramide, glycerin, hyaluronic acid, atau panthenol dikenal mampu membantu menjaga hidrasi kulit lebih lama.

Vitamin C sebagai Antioksidan

Vitamin C merupakan salah satu bahan aktif yang paling banyak direkomendasikan dalam dunia dermatologi untuk membantu mengatasi kulit kusam dan warna kulit tidak merata.

American Academy of Dermatology menjelaskan bahwa vitamin C bekerja sebagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas akibat paparan sinar matahari. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam sintesis kolagen yang menjaga elastisitas kulit. (ist/dya)



Kritik Berulang ...dari hal 1

Pembangunan unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menuai sorotan tajam setelah rekaman visualnya viral di media sosial. Fasilitas ekonomi yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini memicu polemik lantaran didirikan di kawasan bukit dekat objek wisata taman batu Stone Garden. Sejumlah pengunjung mengeluhkan posisi bangunan berukuran 20 x 30 meter tersebut yang dinilai tidak strategis karena jauh dari permukiman.

"Janggal. Siapa yang mau beli naik ke atas?" kata Fahrul (30), salah seorang pengunjung asal Kota Cimahi yang mempertanyakan konsep penjualan koperasi tersebut. Menurutnya, warga akan lebih memilih membeli kebutuhan di minimarket bawah bukit ketimbang harus merogoh kocek lagi untuk biaya tiket masuk dan parkir wisata yang jalurnya menyatu dengan akses koperasi. Nada sangsi juga dilontarkan oleh Rizal (17), pengunjung asal Lembang. "Saha nu meserna (Siapa yang mau beli di koperasi)?" ucapnya ketus.

Kepala Desa Gunung Masigit, Tarkopa, membantah narasi liar yang menyebut koperasi tersebut dibangun di puncak gunung yang terisolasi. Menurut dia, bangunan itu berdiri di atas tanah carik desa yang terletak di area lapang parkir bawah Stone Garden.

Pemilihan titik ini dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara setelah menyurvei lima alternatif lahan yang diajukan pemerintah desa.

"Posisinya bukan di atas gunung. Lokasinya berada di bawah Gunung Masigit, tepat di area parkir Stone Garden. Pembangunannya juga tidak mengganggu lahan parkir karena penempatannya sudah diatur," ujar Tarkopa.

Progres pembangunan fisik gedung sendiri saat ini telah mencapai 90 persen dan direncanakan untuk memasok kebutuhan pokok bagi warung-warung di area wisata.

Kendati diklaim telah melalui proses survei, kontroversi penempatan lokasi proyek KDMP bukan kali pertama terjadi. Di Kampung Cilengsar, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga, pembangunan unit koperasi serupa memicu keluhan karena mengusur lapangan olahraga milik desa. Akibatnya, para siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Cibitung kini kehilangan sarana luar ruang.

"Ketika mau praktik di lapangan, materi di kelas," ungkap Elya Karlianah, salah satu guru MI Cibitung. Lapangan yang biasa digunakan warga untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan



17 Agustus tersebut kini telah tertutup oleh bangunan koperasi yang belum rampung.

Pola pembangunan di lokasi ekstrem dengan biaya fantastis ini nyatanya merebak di berbagai wilayah. Di Sumatera Barat, proyek KDMP yang berdiri di kawasan tebing Ngarai Sianok, Nagari Sianok Anam Suku, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, juga sempat memicu kehebohan publik karena anggarannya yang dinilai jumbo.

Komandan Kodim 0304/Agam Letkol Inf Slamet Dwi Santoso mengonfirmasi bahwa pemerintah menetapkan standar anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk setiap unit bangunan KDMP berukuran 20 x 30 meter.

"Pembangunan sesuai dengan yang disebutkan pemerintah, yaitu Rp 1,5 miliar," kata Slamet.

Namun, ia menjelaskan bahwa di lapangan diterapkan sistem subsidi silang akibat kondisi geografis yang sulit seperti di perbukitan Kecamatan Palembayan yang membuat biaya angkut material membengkak. Saat ini, dari 25 titik proyek di bawah Kodim 0304/Agam, baru 14 bangunan yang selesai, sementara wilayah Kota Bukittinggi justru belum bisa memulai proyek akibat kendala ketiadaan lahan.

Riuh sentimen negatif di media sosial tak jarang berbenturan dengan klarifikasi otoritas lokal. Di Bengkulu, rekaman video yang memperlihatkan sebuah gedung KDMP dikelilingi pohon sawit sempat viral dengan narasi "berdiri di tengah hutan terisolasi". Kepala Desa Sungai Petai, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Rendi, langsung menepis kabar miring tersebut. Ia menegaskan bangunan itu bertempat di Dusun I, berjarak 150 meter dari permukiman warga, serta berdekatan dengan masjid dan lapangan desa.

"Video itu tidak menjelaskan kondisi sebenarnya. Faktanya, lokasi KDMP berada di tengah desa, bukan di tengah hutan seperti yang dinarasikan," ujar Rendi.

Menurutnya, bangunan didirikan

di atas sisa tanah desa seluas seperempat hektar yang aman dari penyerobotan lahan kebun ilegal. Dandim 0425/Seluma Letkol (Kav) Yuliansyah mengamini bahwa letak proyek sudah berdasarkan mufakat warga desa di daerah pedalaman tersebut, meski ia mengakui akses jalan ke sana memang belum beraspal.

Meskipun beberapa pemda memberikan klarifikasi, persoalan tata kelola di tingkat tapak kian rumit oleh maraknya keluhan manajemen operasional dari wilayah lain. Laporan mencatat para pengurus KDMP di Pamekasan didera kebingungan akibat tugas dan gaji yang tidak jelas. Sementara para pegawai KDMP di Bojonegoro bahkan melakukan aksi mogok kerja hingga menutup gerai akibat upah yang terlalu kecil.

Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menghentikan operasionalnya setelah para pengelola memutuskan mogok kerja. Gerai yang baru beroperasi beberapa bulan itu resmi ditutup sejak Jumat, 3 Juli 2026.

Gerai tersebut sebelumnya sempat menjadi perhatian karena dikunjungi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Selain itu, pada 11 Juni 2026 lokasi tersebut juga menjadi tempat kunjungan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa M, dalam peluncuran program KDMP.

Kepala Desa Campurejo, Edi Susanto, membenarkan bahwa penghentian operasional gerai dipicu aksi mogok kerja para pengelolanya.

"Kemarin pengelola KDMP mengadu akan menutup gerai," kata Edi Susanto, Senin (6/7/2026).

Menurut Edi, para pegawai merasa kecewa terhadap sistem kerja yang diterapkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Salah satu persoalan utama adalah besaran upah yang diterima selama menjalankan operasional koperasi, yang dinilai jauh dari harapan.

"Informasinya, selama ini mereka menerima upah sebesar Rp76.000 per hari," tuturnya.

Selain persoalan gaji, para pegawai

Ketentuan

Pembangunan

Fisik KDMP

- **Luas Lahan:**
Minimal 600 m², bangunan sekitar 20 x 30 meter, dengan area parkir minimal 7 meter di depan gerai.
- **Larangan Lahan:**
Tidak boleh dibangun di LSD atau LP2B. Jika digunakan, wajib menyediakan lahan pengganti hingga 3 kali luas yang dipakai.
- **Syarat Lahan:**
Siap bangun, tanah stabil, bebas longsor, banjir, patahan gempa, dan SUTET, berstatus jelas, diutamakan tanah kas desa/aset daerah, serta bebas sengketa.
- **Anggaran:**
Maksimal Rp3 miliar per unit, termasuk gerai, gudang, dan fasilitas pendukung.
- **Pelaksanaan:**
Target selesai 3 bulan, diawasi Satgas KDMP, TNI, dan Kementerian PU, dapat dikerjakan secara swakelola atau padat karya.

Payung Hukum

Pembangunan KDMP

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP.
- Surat Edaran Menteri Koperasi tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan dan pembangunan KDMP.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pembiayaan percepatan pembangunan KDMP.

juga mempertanyakan kejelasan hubungan kerja mereka. Hingga saat ini, menurut pengakuan mereka, belum pernah ada surat perjanjian kerja maupun dokumen yang menjelaskan besaran gaji dan hak-hak yang akan diterima.

Mereka juga mengaku belum memperoleh perlindungan ketenagakerjaan, termasuk kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, setiap bulan hasil pendapatan gerai tetap diwajibkan disetorkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.

Edi menilai kekecewaan para pegawai dapat dipahami.

"Saya pikir mereka wajar kecewa terhadap PT Agrinas. Selain gaji yang dinilai sangat kecil, mereka juga tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja," ungkapnya.

Persoalan lain juga muncul di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sejumlah pengurus KDMP mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai besaran gaji maupun tugas yang akan mereka jalankan. (wid,kcm,ist,rls/dya)

DIDUGA BERPIHAK DAN TIDUR SAAT SIDANG, NADIEM LAPORKAN 4 HAKIM

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, melalui tim kuasa hukumnya resmi melaporkan empat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Keempat hakim yang dilaporkan tersebut adalah Purwanto S. Abdullah, Sunoto, Eryusman, dan Mardiantos. Sementara itu, satu hakim anggota bernama Andi Saputra tidak ikut dilaporkan karena menilai Nadiem seharusnya dibebaskan.

Laporan resmi tersebut diserahkan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta dengan disertai sejumlah bukti pendukung, termasuk rekaman jalannya persidangan. Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, Srnin (6/7/2026) menegaskan tujuan kedatangan mereka, "Alhamdulillah kami sudah resmi membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait kasus yang kami tangani, yaitu kasus Nadiem Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun beberapa laporan kami berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim."

Ari menjelaskan bahwa pihak terdakwa sebenarnya tidak mempermasalahkan vonis bersalah yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Namun, mereka menyoroti adanya indikasi manipulasi terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk kemudian dituangkan ke dalam putusan. "Kami melaporkan empat hakim yang memutus



Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat dalam sidang perkara chomebook dengan terdakwa eks Kemendikbudristek Nadiem Makarim, Selasa (30/6/2026). (Dok)

bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja. Artinya, perbedaan pandangan itu sah, itu merupakan kewenangan majelis hakim. Namun, yang kami sesalkan adalah adanya dugaan manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan," ujarnya.

Ia kemudian merinci lebih lanjut mengenai ketidaksesuaian substansi dalam berkas putusan tersebut. "Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam putusan tetapi tidak disampaikan. Sebaliknya, ada fakta-fakta yang sebenarnya tidak ada, tetapi justru

POIN UTAMA AMAR PUTUSAN HAKIM

- 10 tahun penjara (lebih ringan dari tuntutan 18 tahun).
- Denda Rp1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
- Uang pengganti Rp809,597 miliar; jika tidak dibayar, hukuman bertambah 5 tahun.
- Kerugian negara: Rp1,5 triliun.

dimasukkan ke dalam putusan," jelas Ari.

Selain masalah manipulasi fakta, tim kuasa hukum juga mempersoalkan independensi dan sikap imparial dari Hakim Purwanto dan Hakim Sunoto. Majelis hakim dinilai cenderung tebang pilih dalam memperlakukan keterangan para saksi. "Misalnya pada pemeriksaan saksi Fiona dan saksi Andre yang keterangannya menguntungkan terdakwa. Keterangan mereka seakan-akan dipotong-potong dan diabaikan. Sebaliknya, saksi-saksi yang dianggap memberatkan justru digali sedemikian rupa," kata Ari.

Pelanggaran lain yang dinilai sangat fatal adalah perilaku tidak beretika saat persidangan berjalan, di mana ada hakim yang kedapatan tidur. "Ada dua hakim, yaitu Hakim Eryusman dan satu hakim lainnya, yang selama persidangan tidur. Kami memiliki bukti rekamannya. Bagaimana mereka dapat memberikan penilaian terhadap proses persidangan apabila mereka tidur? Karena seluruh proses direkam, maka hal tersebut mudah dibuktikan," tegas Ari.

Persoalan administrasi dan integritas juga membayangi penunjukan ketua majelis hakim. Ari mengungkap adanya pengabaian terhadap sanksi yang pernah dikeluarkan oleh KY sebelumnya. "Pertama, hakim ketua majelis yaitu Hakim Purwanto, yang sudah dijatuhi putusan non-palu oleh Komisi Yudisial dalam perkara Tom Lembong, justru ditunjuk kembali sebagai majelis hakim dalam kasus Nadiem Makarim," beber Ari. (wid ist kum/dya)

Dasco soal Sinyal Keringanan Hukuman

KETUA Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meluruskan spekulasi publik mengenai sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya yang berisi ucapan selamat ulang tahun untuk mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Dasco membantah keras jika unggahan tersebut dinilai sebagai sinyal atau indikasi adanya rencana dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan keringanan hukum, amnesti, ataupun abolisi bagi terpidana kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tersebut.

Menanggapi ramainya spekulasi tersebut, Dasco mengungkapkan keheranannya, "Saya juga bingung jawabnya. Karena sebenarnya kan enggak ada maksud begitu."

Ia kemudian mengklarifikasi bahwa seluruh akun media sosial pribadinya, termasuk Instagram, tidak dioperasikan secara langsung oleh dirinya melainkan dikelola oleh tim administrator. Menurut penjelasan Dasco, akun tersebut saat ini sedang dipegang oleh seorang

admin baru yang memiliki program kerja rutin untuk mengunggah ucapan selamat ulang tahun bagi setiap tokoh nasional maupun pejabat publik yang sedang merayakan hari kelahirannya.

Dasco menegaskan bahwa munculnya ucapan untuk Nadiem Makarim murni sebuah kebetulan momentum dan tidak memiliki muatan politis sama sekali, mengingat ke depannya akun tersebut juga akan melakukan hal yang sama untuk figur-figur lainnya. "Membiasakan sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun," ujar Dasco.

Ia pun menambahkan untuk memperjelas situasi, "Kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa? Ya, selamat ulang tahun begitu."

Melalui pernyataan tersebut, Dasco memberikan isyarat bahwa hingga saat ini belum ada agenda atau pembicaraan terkait pemberian pengampunan maupun pembebasan terhadap Nadiem dari pihak pemerintah. Ia mengingatkan bahwa

proses hukum saat ini masih berjalan dan kubu Nadiem sedang menempuh jalur konstitusional yang tersedia.

Saat ini, baik pihak Nadiem Makarim maupun Kejaksaan Agung sama-sama tengah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor DKI Jakarta, setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar kepada pendiri Gojek tersebut.

Tim kuasa hukum Nadiem Makarim memberikan tanggapan resmi terkait unggahan ucapan selamat ulang tahun yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melalui media sosial. Pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa pihaknya membatasi diri untuk tidak mencampuri hal tersebut dari sudut pandang personal. "Kalau kami dari tim pengacara tidak bisa mengomentari itu karena itu bukan ranah kami ya," ujar Ari di Kantor Komisi Yudisial. (wid, ust/dya)